



Nama Formulir:
**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.	Dikosongkan *(diisi admin prodi)
Issue/Revisi	1
Tgl Berlaku	-
Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Dr. Husain Heriyanto
Jabatan Dosen
Program Studi Program Magsiter Ilmu Agama Islam
NIP S20160409

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Demokrasi dalam Islam: Antara Teori dan Praktik

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap AH IQBAL FAHMI
Jenjang S2 *
Program Studi Ilmu Agama Islam
NIM 224141016

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 24 Februari 2026

Penelaah,

NIP: S20160409

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	AH IQBAL FAHMI
Jenjang	S2 *
Program Studi	Ilmu Agama Islam
NIM	224141016
Alamat	Komplek Bumi Pamulang Pratama Blok. B18 RT:9/03 Bambu Apus – Pamulang – Tangerang Selatan

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Demokrasi dalam Islam: Antara Teori dan Praktik

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 24 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: AH IQBAL FAHMI
NIM: 224141016

Demokrasi dalam Islam; Antara Teori dan Praktik

Oleh : Ah. Iqbal Fahmi¹, Muhammad Andriansyah²

Abstrak

Perdebatan mengenai kompatibilitas demokrasi dengan Islam merupakan isu sentral dalam kajian politik dunia Muslim kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa kegagalan atau kemunduran demokrasi di banyak negara mayoritas Muslim tidak dapat direduksi pada faktor teologis Islam semata, melainkan harus dipahami melalui interaksi kompleks antara warisan kolonial, struktur negara pasca-kolonial, dominasi militer, ekonomi politik rentier, serta kontestasi ideologis antara Islam politik moderat dan gerakan Islamis radikal yang menolak demokrasi. Dengan pendekatan analitis-komparatif dan berbasis literatur internasional, artikel ini mengkaji dinamika demokrasi di negara-negara Muslim, sekaligus menelaah secara khusus gerakan penolak demokrasi seperti Hizbut Tahrir sebagai fenomena ideologis transnasional.

Kata kunci: Demokrasi, Dunia Muslim, Islam Politik, Otoritarianisme, *Democratic Backsliding*

Abstract

The debate over the compatibility of democracy and Islam remains a central issue in contemporary political studies of the Muslim world. This article argues that the failure or regression of democracy in many Muslim-majority countries cannot be reduced solely to theological factors within Islam. Rather, it must be understood through the complex interaction of colonial legacies, post-colonial state structures, military dominance, rentier political economies, and ideological contestation between moderate political Islam and radical Islamist movements that reject democracy. Employing a comparative-analytical approach grounded in international scholarship, this article examines the dynamics of democracy in Muslim-majority countries, while also specifically analyzing anti-democratic movements such as Hizbut Tahrir as a transnational ideological phenomenon.

Keywords: Democracy, Muslim World, Political Islam, Authoritarianism, Democratic Backsliding

A. Pendahuluan

Diskursus tentang demokrasi dalam Islam muncul dari ketegangan epistemologis antara nilai-nilai keagamaan dan tuntutan modernitas politik. Pada satu sisi, Islam mengajarkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, pada sisi lain, tradisi politik Islam klasik lebih sering mengarah pada bentuk monarki atau oligarki yang menempatkan kekuasaan pada elite keagamaan atau politik.

Sejarah politik Islam sejak masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* memperlihatkan dinamika yang kompleks. Abu Bakar dipilih melalui konsensus, Umar ditunjuk langsung, Utsman melalui majelis terbatas, dan Ali mengalami konflik legitimasi. Empat model suksesi kepemimpinan tersebut sering dijadikan dasar argumentatif bahwa Islam mengenal prinsip *musyawarah terbatas* tetapi belum sampai pada konsep *demokrasi representatif*.

Seiring perkembangan zaman, para pemikir Muslim modern berupaya menafsirkan ulang tradisi politik Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, melainkan menekankan tujuan moral pemerintahan, yakni keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum.

Pertanyaan mengenai apakah demokrasi cocok dengan negara mayoritas Muslim memang telah lama menjadi perdebatan akademik dan politik global. Sejak akhir Perang Dingin hingga pasca-Arab Spring, dunia Muslim sering diposisikan sebagai “anomali demokrasi”, ditandai oleh rendahnya tingkat

¹ Mahasiswa Magister PGSI Paramadina

² Mahasiswa Magister PGSI Paramadina

konsolidasi demokrasi dibanding kawasan lain.³ Namun, asumsi bahwa Islam secara inheren bertentangan dengan demokrasi semakin dipertanyakan oleh penelitian empiris mutakhir yang menunjukkan bahwa faktor struktural dan historis jauh lebih menentukan daripada doktrin agama itu sendiri.⁴ Artikel ini bertujuan untuk (1) menelusuri sejauh mana demokrasi secara teoretis kompatibel dengan Islam; (2) menganalisis dinamika demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim secara struktural dan komparatif, dan (3) menjelaskan pola keberhasilan, kegagalan, dan kemunduran demokrasi.

B. Akar Teoretis Demokrasi dalam Dunia Islam

Secara tekstual, Al-Qur'an tidak menggunakan istilah *demokrasi*; namun, konsep-konsep yang menjadi ruh demokrasi modern dapat ditemukan dalam beberapa ayat. Ayat “*wa amruhum shūrā baynahum*” (QS. Ash-Syūrā [42]: 38) menunjukkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.⁵ *Tafsir* klasik seperti al-Qurṭubī menafsirkan ayat ini sebagai dasar partisipasi umat dalam urusan publik.⁶ Selain itu, konsep ‘*adl*’ (keadilan) dan *ihsān* (kebaikan sosial) merupakan norma etis yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷ Dalam konteks politik, ‘*adl*’ menjadi prasyarat legitimasi kekuasaan, sebagaimana ditegaskan oleh al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* bahwa kepemimpinan hanya sah bila adil dan mampu menegakkan hukum Allah dengan maslahat rakyat.⁸

Sementara itu, hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan praktik konsultatif dalam berbagai urusan kenegaraan; misalnya, dalam Perang Uhud, beliau menerima saran dari sahabat muda untuk keluar dari Madinah meskipun berbeda dari pendapat pribadinya.⁹ Hal ini menjadi preseden bagi prinsip deliberasi publik—yakni keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks normatif ini, Abdulaziz Sachedina (2001) menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam lebih berorientasi pada nilai etika pemerintahan daripada bentuk institusional tertentu.¹⁰ Dengan demikian, demokrasi dalam Islam dapat dimaknai bukan sebagai bentuk pemerintahan spesifik, melainkan sebagai kerangka moral yang menuntut akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi rakyat.

Perdebatan teoretis dalam Islam sering berpusat pada isu kedaulatan. Dalam demokrasi Barat, kedaulatan berada di tangan rakyat; sementara dalam Islam, kedaulatan tertinggi adalah milik Allah (*al-ḥākimiyyah li-llāh*).¹¹ Perdebatan ini menjadi lebih kompleks setelah munculnya pemikir modernis seperti Ali Abdel Raziq dalam karyanya *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* (1925), yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mendirikan negara teokratis, melainkan komunitas moral.¹² Pemerintahan pasca-Nabi, menurutnya, adalah hasil *ijtihad* politik manusia. Pandangan ini memicu gelombang reformasi intelektual di dunia Islam karena membuka ruang bagi gagasan pemerintahan sipil.

Sebaliknya, pemikir seperti Abul A‘la Maududi dan Sayyid Qutb menolak demokrasi liberal karena dinilai bertentangan dengan konsep *ḥākimiyyah*.¹³ Maududi memperkenalkan istilah “*theo-democracy*” yang memadukan kedaulatan Tuhan dengan partisipasi rakyat melalui lembaga *shūrā*. Dalam pandangannya, umat berperan sebagai *khalifah kolektif*, sedangkan negara bertugas menegakkan syariat.¹⁴ Qutb menegaskan hal serupa dalam *Ma‘ālim fī Ṭ-Ṭarīq*, bahwa sistem politik Islam harus tunduk kepada hukum ilahi, bukan pada suara mayoritas.¹⁵ Kritik mereka terhadap demokrasi Barat berakar pada kekhawatiran bahwa sekularisme dapat menggantikan supremasi hukum Tuhan. Namun,

³ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy* (New York: Times Books, 2008).

⁴ Ahmet T. Kuru, *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment* (Cambridge: CUP, 2019)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*, Vol. 16 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 190.

⁷ Al-Ghazālī, *Iḥyā‘ ‘Ulūm al-Dīn*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993).

⁸ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 17–19.

⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād, Bāb Mashūrāt al-Nabī li-Aṣḥābih* (Riyadh: Dār al-Salām, 1987).

¹⁰ A. Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (Oxford University Press, 2001).

¹¹ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1980), hlm. 27–29.

¹² ‘Alī ‘Abd al-Rāziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* (Cairo: Maṭba‘at Miṣr, 1925), hlm. 36–42.

¹³ Abul A‘la Maududi, *Islamic Law and Constitution*, ed. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1960), hlm.

¹⁴ Abul A‘la Maududi, *The Islamic Way of Life* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1967), hlm. 81–85.

¹⁵ Sayyid Qutb, *Ma‘ālim fī Ṭ-Ṭarīq* (Cairo: Dār al-Shurūq, 1964), hlm. 52–59.

gelombang reformasi pasca-1970-an menghadirkan pendekatan baru yang lebih pluralis. Rachid Ghannouchi, pendiri *Ennahda* Tunisia, berpendapat bahwa demokrasi adalah mekanisme terbaik untuk mewujudkan prinsip *shūrā* secara kontekstual.¹⁶ Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama menjamin keadilan, kebebasan, dan keterlibatan masyarakat.¹⁷

C. Praktik Demokrasi di Dunia Islam

Kompatibilitas nilai Islam dengan demokrasi tampaknya tidak lantas menjadikan negara-negara dengan mayoritas muslim menjadi demokratis. Secara praktik, banyak negara muslim yang gagal, paling kurang amat rendah dalam mempraktikkan demokrasi. Laporan *Democracy Index 2024* yang diterbitkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dan *Democracy Report 2025* oleh *Varieties of Democracy (V-Dem) Institute* menunjukkan pola konsisten dalam lanskap politik dunia Islam kontemporer. Kedua laporan tersebut menegaskan bahwa mayoritas negara berpenduduk Muslim masih terkategori sebagai “rezim hibrida” (*hybrid regimes*) atau “otoritarian” (*authoritarian regimes*), dengan hanya sedikit pengecualian di Asia Tenggara dan sebagian Afrika Utara.¹⁸

Menurut data EIU (2024), Malaysia memperoleh skor demokrasi sebesar 7,35 dan Indonesia 7,14, keduanya termasuk dalam kategori *flawed democracy*.¹⁹ Kategori ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sistem elektoral yang kompetitif, kebebasan sipil yang relatif terjamin, dan partisipasi politik yang aktif, namun masih menghadapi kelemahan seperti polarisasi sosial, korupsi, serta dominasi elit dalam pengambilan kebijakan.²⁰ Sebaliknya, Tunisia, yang pernah dianggap sebagai keberhasilan terbesar *Arab Spring*, turun menjadi 5,03 dalam laporan yang sama dan kini digolongkan sebagai *hybrid regime*.²¹ Penurunan ini terutama disebabkan oleh langkah Presiden Kais Saied yang sejak 2021 membubarkan parlemen dan memusatkan kekuasaan eksekutif di tangannya, yang oleh para pengamat disebut sebagai bentuk “democratic backsliding.”²²

Sementara itu, Turki, yang pada awal 2000-an sering dijadikan contoh keberhasilan sintesis antara Islam dan demokrasi di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), kini memperoleh skor 4,24, juga termasuk kategori *hybrid regime*.²³ Laporan EIU menyebutkan bahwa konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan telah mengikis independensi yudikatif, kebebasan media, dan pluralisme politik, sehingga mengubah Turki dari demokrasi elektoral menjadi sistem semi-otoritarian.²⁴

Negara-negara besar lainnya di dunia Islam menunjukkan situasi yang lebih suram. Pakistan mencatat skor 3,15, Mesir 2,23, Iran 1,98, dan Arab Saudi 1,87, semuanya berada dalam kategori *authoritarian regimes*.²⁵ Di negara-negara ini, demokrasi terbatas pada aspek prosedural, karena kekuasaan politik tetap terkonsentrasi di tangan militer, monarki, atau otoritas keagamaan.²⁶ Pemilu, jika pun diadakan, cenderung dikontrol atau diarahkan oleh elite untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan.

¹⁶ Rachid Ghannouchi, *Public Freedoms in the Islamic State*, terj. D. L. Johnston (Beirut: The American University of Beirut Press, 1993), hlm. 112–118.

¹⁷ Rachid Ghannouchi, *On Muslim Democracy* (London: Oxford Centre for Islamic Studies, 2016), hlm. 73–75.

¹⁸ *V-Dem Institute, Democracy Report 2025: Autocratization Turns Viral* (Gothenburg: University of Gothenburg, 2025), hlm. 12–18

¹⁹ *The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024: Age of Conflict* (London: EIU, 2024), hlm. 5–9.

²⁰ T. B. Pepinsky, “Democracy, Islam, and Governance in Southeast Asia.” *Journal of Democracy*, 33(4), 2022: 45–58.

²¹ *The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024*, hlm. 11–12.

²² S. Yerkes, “Tunisia’s Authoritarian Drift: The End of the Arab Spring’s Last Hope.” *Carnegie Endowment for International Peace* (2023).

²³ *The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024*, hlm. 13–14.

²⁴ B. Esen & S. Gumuscu, “Why Did Turkish Democracy Collapse? A Political Economy Account.” *Government and Opposition*, 55(2), 2020: 283–312.

²⁵ *The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024*, hlm. 15–18.

²⁶ J. Brownlee, *Democracy Prevention: The Politics of the U.S.–Egyptian Alliance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 41–44.

Kedua laporan, baik dari EIU (2024) maupun V-Dem (2025), secara eksplisit menyatakan bahwa dari lebih dari 50 negara berpenduduk mayoritas Muslim, hanya dua negara, Indonesia dan Malaysia, yang konsisten masuk kategori demokrasi (meski cacat).²⁷ Sebagian besar lainnya masih berjuang dengan *defisit demokrasi* yang dalam, ditandai oleh lemahnya masyarakat sipil, pembatasan kebebasan berpendapat, serta dominasi aparat keamanan dan agama dalam kehidupan publik.²⁸ Kondisi ini menegaskan bahwa faktor agama bukanlah penyebab utama lemahnya demokrasi di dunia Islam, melainkan struktur politik dan sejarah kolonial yang membentuk hubungan antara negara, militer, dan agama.²⁹ Asia Tenggara, dengan tradisi Islam yang plural dan non-konfrontatif, seperti di Indonesia dan Malaysia, membuktikan bahwa demokrasi dapat tumbuh dalam masyarakat Muslim.³⁰ Sebaliknya, di Timur Tengah dan Asia Selatan, kolonialisme, otoritarianisme militer, dan politisasi agama telah menciptakan kultur politik yang sulit menerima oposisi dan partisipasi terbuka.³¹

Dengan demikian, praktik demokrasi di dunia Islam secara empiris menunjukkan keberagaman hasil: berhasil di negara yang memiliki struktur sosial plural, ekonomi menengah, dan tradisi moderat; tetapi gagal di kawasan dengan otoritarianisme historis dan identitas agama yang dipolitisasi.³²

Negara	Skor Demokrasi (0–10)	Kategori
Indonesia	7.14	<i>Flawed Democracy</i>
Malaysia	7.35	<i>Flawed Democracy</i>
Tunisia	5.03	<i>Hybrid Regime</i>
Turkey	4.24	<i>Hybrid Regime</i>
Pakistan	3.15	<i>Authoritarian Regime</i>
Egypt	2.23	<i>Authoritarian Regime</i>
Iran	1.98	<i>Authoritarian Regime</i>
Saudi Arabia	1.87	<i>Authoritarian Regime</i>

Sumber: *The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024: “Age of Conflict.”*

C. Mengapa Demokrasi Gagal di Dunia Islam?

Kegagalan demokrasi di sebagian besar negara Muslim tidak semata-mata disebabkan oleh ajaran Islam atau nilai-nilai teologis yang menolak demokrasi. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari kompleksitas historis, ekonomi, dan politik struktural yang terbentuk melalui warisan kolonialisme, dominasi militer, serta lemahnya lembaga sipil.³³ Dalam konteks ini, demokrasi gagal bukan karena Islam tidak kompatibel dengannya, melainkan karena lingkungan sosial-politik yang tidak kondusif untuk konsolidasi demokrasi.

a. Warisan Kolonial dan Struktur Negara Otoriter

Salah satu faktor paling kuat yang menjelaskan lemahnya demokrasi di dunia Islam adalah warisan kolonialisme Eropa.³⁴ Banyak negara Muslim merdeka pasca-Perang Dunia II mewarisi sistem pemerintahan yang dirancang bukan untuk partisipasi rakyat, melainkan untuk pengendalian

²⁷ V-Dem Institute, *Democracy Report 2025*, hlm. 28–29.

²⁸ Freedom House, *Freedom in the World 2025: Global Expansion of Authoritarian Influence* (Washington, DC: Freedom House, 2025), hlm. 37–42.

²⁹ M. S. Fish, *Are Muslims Distinctive? A Look at the Evidence* (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 155–160.

³⁰ R. W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2019), hlm. 211–218.

³¹ A. T. Kuru, *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 263–269.

³² L. Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the World* (New York: Times Books, 2008), hlm. 134–139.

³³ L. Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the World*, hlm. 131–138.

³⁴ Ahmet T. Kuru, *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 114–118.

administratif dan eksploitasi sumber daya.³⁵ Di Timur Tengah dan Afrika Utara, sistem kolonial Prancis dan Inggris membentuk struktur negara yang sentralistik, militeristik, dan berorientasi pada stabilitas kekuasaan, bukan pada akuntabilitas publik.³⁶

Misalnya, Mesir pascakolonial mengadopsi model negara birokratik-militer yang dirancang oleh kolonial Inggris pada awal abad ke-20.³⁷ Setelah revolusi 1952, Gamal Abdel Nasser memperkuat sistem tersebut dengan ideologi nasionalisme Arab yang menolak pluralisme politik. Model ini kemudian menjadi pola bagi banyak rezim pasca-kolonial di dunia Islam — termasuk di Suriah, Aljazair, dan Irak.³⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Jason Brownlee, otoritarianisme pasca-kolonial di dunia Islam sering bertahan bukan karena represi semata, melainkan karena adanya koalisi kepentingan antara elite militer, birokrasi, dan ulama negara yang bersama-sama memonopoli kekuasaan dan sumber daya ekonomi.³⁹ Sistem ini menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi membunuh dinamika politik yang diperlukan bagi tumbuhnya demokrasi.⁴⁰

b. Peran Militer sebagai Penentu Politik

Di banyak negara Muslim, militer memainkan peran dominan dalam politik, baik secara langsung melalui kudeta maupun secara tidak langsung melalui kontrol ekonomi dan institusional.⁴¹ Studi Aqil Shah tentang Pakistan menunjukkan bahwa sejak 1958 hingga kini, militer menjadi “penguasa bayangan” yang menentukan arah politik sipil melalui pengendalian anggaran, keamanan, dan kebijakan luar negeri.⁴²

Fenomena serupa terjadi di Mesir, di mana militer bukan hanya institusi keamanan, tetapi juga kekuatan ekonomi besar yang menguasai 20–30% ekonomi nasional.⁴³ Setelah Presiden Morsi digulingkan pada 2013, militer kembali menjadi aktor dominan dalam menentukan orientasi negara, menandai kembalinya rezim otoriter yang dikemas dalam bentuk demokrasi prosedural.⁴⁴

Di dunia Islam lainnya, seperti Turki, hubungan sipil-militer juga menjadi faktor kunci. Walaupun Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) awalnya berhasil menurunkan peran politik militer, perubahan konstitusi di bawah Erdoğan justru mengubahnya menjadi otoritarianisme elektif, di mana legitimasi diperoleh melalui pemilu tetapi kekuasaan terkonsentrasi di tangan eksekutif.⁴⁵

Menurut S. Noor (2025), korelasi antara dominasi militer dan rendahnya skor demokrasi dalam laporan *V-Dem* menunjukkan bahwa militerisme tetap menjadi hambatan terbesar bagi pelembagaan demokrasi di dunia Islam.⁴⁶ Dalam konteks ini, reformasi sipil-militer bukan hanya isu keamanan, melainkan inti dari transformasi politik menuju pemerintahan demokratis.

c. Ekonomi Rentier dan Ketergantungan Negara

Faktor penting lainnya adalah struktur ekonomi rentier, di mana negara bergantung pada pendapatan

³⁵ Nazih Ayubi, *Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East* (London: I.B. Tauris, 1995), hlm. 21–25.

³⁶ John Waterbury, *The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes* (Princeton: Princeton University Press, 1983), hlm. 44–46.

³⁷ Jason Brownlee, *Democracy Prevention: The Politics of the U.S.–Egyptian Alliance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 63–68.

³⁸ Zoltan Barany, *The Soldier and the Changing State* (Princeton: Princeton University Press, 2012), hlm. 213–220.

³⁹ Aqil Shah, *The Army and Democracy: Military Politics in Pakistan* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), hlm. 51–57.

⁴⁰ Steven A. Cook, *False Dawn: Protest, Democracy, and Violence in the New Middle East* (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 102–106.

⁴¹ Berk Esen and Sebnem Gumuscu, “Why Did Turkish Democracy Collapse? A Political Economy Account,” *Government and Opposition* 55, no. 2 (2020): 283–312.

⁴² S. Noor, “Civil–Military Relations and Their Impact on Democratic Outcomes in Pakistan,” *Annals of Human and Social Sciences* 12, no. 1 (2025): 71–75.

⁴³ Hazem Beblawi, “The Rentier State in the Arab World,” in *The Arab State*, ed. Giacomo Luciani (London: Routledge, 1987), hlm. 49–62.

⁴⁴ Michael Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” *World Politics* 53, no. 3 (2001): 325–361.

⁴⁵ Jill Crystal, *Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 41–46.

⁴⁶ Michael Herb, “No Representation without Taxation? Rents, Development, and Democracy,” *Comparative Politics* 37, no. 3 (2005): 297–316.

sumber daya alam — terutama minyak dan gas — sehingga tidak bergantung pada pajak rakyat.⁴⁷ Model ekonomi semacam ini, menurut Giovanni Sartori dan diperkuat oleh Hazem Beblawi, menciptakan apa yang disebut *rentier state syndrome*: negara yang kaya tetapi masyarakatnya tidak berdaya secara politik.⁴⁸

Contohnya, di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, pendapatan negara yang tinggi dari minyak memungkinkan pemerintah memberikan subsidi besar dan tunjangan sosial untuk mempertahankan legitimasi tanpa membuka ruang partisipasi politik.⁴⁹ Dalam konteks ini, kemakmuran menggantikan representasi, dan stabilitas dipertahankan melalui redistribusi ekonomi, bukan melalui demokratisasi.⁵⁰

Sementara itu, negara-negara non-penghasil minyak seperti Pakistan dan Mesir mengalami versi lain dari fenomena yang sama: ketergantungan pada bantuan luar negeri (terutama dari Amerika Serikat dan Arab Saudi), yang mengurangi insentif pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan kepada warganya.⁵¹

d. Politisasi Agama dan Ketegangan Identitas

Faktor keempat adalah politisasi agama. Di banyak negara Muslim, Islam dijadikan sumber legitimasi politik, baik oleh penguasa maupun oposisi.⁵² Ketika agama dijadikan instrumen kekuasaan, muncul dikotomi tajam antara “Islam otentik” versus “Barat liberal”, yang justru meminggirkan nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan kebebasan berpendapat.⁵³

Sebagaimana ditunjukkan oleh Roxanne L. Euben dan Muhammad Qasim Zaman, politisasi Islam modern sering kali menolak demokrasi bukan karena prinsip Islam itu sendiri, tetapi karena demokrasi dipersepsikan sebagai produk peradaban Barat yang hegemonik.⁵⁴ Akibatnya, proyek demokratisasi kerap ditolak bukan karena teologi, melainkan karena sentimen anti-imperial dan identitas postkolonial.²³ Namun, sejumlah pemikir Muslim modern seperti Rachid Ghannouchi dan Abdolkarim Soroush berpendapat sebaliknya: bahwa demokrasi adalah sarana moral untuk menegakkan keadilan dan menghindari tirani. Dengan demikian, tantangan utama bukan pada ideologinya, tetapi pada institusionalisasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks masyarakat yang terfragmentasi oleh politik identitas.

e. Lemahnya Kelas Menengah dan Masyarakat Sipil

Akhirnya, ketidakmatangan kelas menengah dan lemahnya masyarakat sipil menjadi faktor penentu. Demokrasi memerlukan kelompok sosial yang independen secara ekonomi dan aktif secara politik untuk menekan negara agar akuntabel. Di banyak negara Muslim, kelas menengah justru bergantung pada negara — baik sebagai pegawai negeri, kontraktor, maupun penerima subsidi.²⁷

Seperti dicatat oleh Larry Diamond, tanpa masyarakat sipil yang kuat, pemilu hanya menghasilkan demokrasi elektoral tanpa demokrasi substantif, di mana elit tetap memonopoli sumber daya dan kekuasaan melalui partai atau institusi negara.

Kasus Indonesia dan Malaysia menjadi pengecualian karena keduanya memiliki masyarakat sipil

⁴⁷ Ahmet T. Kuru, *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 243–247.

⁴⁸ Roxanne L. Euben and Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought* (Princeton: Princeton University Press, 2009), hlm. 241–245.

⁴⁹ Roxanne L. Euben and Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought* (Princeton: Princeton University Press, 2009), hlm. 241–245.

⁵⁰ Rachid Ghannouchi, *Public Freedoms in the Islamic State* (Beirut: American University of Beirut Press, 1993), 110–115; Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 85–90

⁵¹ Barrington Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Boston: Beacon Press, 1966), hlm. 435–440

⁵² Larry Diamond, *The Spirit of Democracy* (New York: Times Books, 2008), hlm. 156–162.

⁵³ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2019), hlm. 208–215.

⁵⁴ Ahmet T. Kuru, *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 261–269.

yang relatif mapan dan jaringan Islam moderat yang mendukung pluralisme politik. Dengan demikian, keberhasilan demokrasi di dunia Islam sangat bergantung pada hubungan dialektis antara agama, ekonomi, dan kekuatan sipil, bukan pada faktor tunggal semata.

D. Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa demokrasi di dunia Muslim secara teoretis kompatibel dengan demokrasi. Akan tetapi, dalam praktik, banyak negara-negara muslim yang gagal menerapkannya. Hal ini lebih disebabkan konfigurasi kekuasaan, warisan kolonial, dominasi militer, ekonomi rentier, dan konflik geopolitik yang tidak pernah sepi menerpa dunia Muslim. Sebagian kaum Muslim memang menolak demokrasi. Akan tetapi, fenomena ini boleh dibilang lebih digemakan oleh kaum minoritas Muslim ideologis dan tidak menjadi arus utama dalam pemikiran Islam. Dengan demikian, masa depan demokrasi di dunia Muslim sangat bergantung pada reformasi institusional, supremasi sipil atas militer, serta artikulasi Islam politik yang kompatibel dengan prinsip pluralisme, keadilan, dan akuntabilitas publik.

C. Daftar Pustaka

- Abd al-Rāziq, 'A. (1925). *Al-Islām wa uṣūl al-ḥukm*. Cairo: Maṭba'at Miṣr.
- Al-Bukhārī. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-jihād, bāb mashūrāt al-nabī li-aṣḥābih*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Al-Ghazālī. (1993). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Māwardī. (1996). *Al-aḥkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī. (1964). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'an* (Vol. 16). Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Asad, M. (1980). *The principles of state and government in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Ayubi, N. (1995). *Over-stating the Arab state: Politics and society in the Middle East*. London: I.B. Tauris.
- Barany, Z. (2012). *The soldier and the changing state: Building democratic armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas*. Princeton: Princeton University Press.
- Beblawi, H. (1987). The rentier state in the Arab world. In G. Luciani (Ed.), *The Arab state*. London: Routledge.
- Brownlee, J. (2012). *Democracy prevention: The politics of the U.S.–Egyptian alliance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, S. A. (2017). *False dawn: Protest, democracy, and violence in the new Middle East*. Oxford: Oxford University Press.
- Crystal, J. (1995). *Oil and politics in the Gulf: Rulers and merchants in Kuwait and Qatar*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies in the world*. New York: Times Books.
- Esen, B., & Gumuscu, S. (2020). Why did Turkish democracy collapse? A political economy account. *Government and Opposition*, 55(2), 283–312.
- Euben, R. L., & Zaman, M. Q. (2009). *Princeton readings in Islamist thought*. Princeton: Princeton University Press.
- Fish, M. S. (2011). *Are Muslims distinctive? A look at the evidence*. New York: Oxford University Press.
- Freedom House. (2025). *Freedom in the world 2025: Global expansion of authoritarian influence*. Washington, DC: Freedom House.
- Ghannouchi, R. (1993). *Public freedoms in the Islamic state* (D. L. Johnston, Trans.). Beirut: American University of Beirut Press.

- Ghannouchi, R. (2016). *On Muslim democracy*. London: Oxford Centre for Islamic Studies.
- Hefner, R. W. (2019). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press
- Herb, M. (2005). No representation without taxation? Rents, development, and democracy. *Comparative Politics*, 37(3), 297–316.
- Kuru, A. T. (2019). *Islam, authoritarianism, and underdevelopment: A global and historical comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maududi, A. A. (1960). *Islamic law and constitution* (K. Ahmad, Ed.). Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Maududi, A. A. (1967). *The Islamic way of life*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Moore, B. (1966). *Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of the modern world*. Boston: Beacon Press.
- Noor, S. (2025). Civil–military relations and their impact on democratic outcomes in Pakistan. *Annals of Human and Social Sciences*, 12(1), 71–75.
- Pepinsky, T. B. (2022). Democracy, Islam, and governance in Southeast Asia. *Journal of Democracy*, 33(4), 45–58.
- Qutb, S. (1964). *Ma ‘ālim fī ṭ-ṭarīq*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Ross, M. (2001). Does oil hinder democracy? *World Politics*, 53(3), 325–361.
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic roots of democratic pluralism*. New York: Oxford University Press.
- Shah, A. (2014). *The army and democracy: Military politics in Pakistan*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Soroush, A. (2000). *Reason, freedom, and democracy in Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- The Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy index 2024: Age of conflict*. London: The Economist Intelligence Unit.
- V-Dem Institute. (2025). *Democracy report 2025: Autocratization turns viral*. Gothenburg: University of Gothenburg.
- Waterbury, J. (1983). *The Egypt of Nasser and Sadat: The political economy of two regimes*. Princeton: Princeton University Press.
- Yerkes, S. (2023). Tunisia’s authoritarian drift: The end of the Arab Spring’s last hope. *Carnegie Endowment for International Peace*.